

# Menyoal Tata Kelola Perberasan Nasional

RAFNEL AZHARI

*Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unand  
Peneliti di Pusat Pembangunan Pangan Inklusif Unand*

**BERAS** adalah kehidupan itu sendiri. Bukan hanya bagi petani semata, tetapi juga bagi bangsa dan negara ini. Kebijakan perberasan yang salah bisa menimbulkan kegaduhan secara terus menerus, kemunduran berbangsa sampai pada kejatuhan pemerintah. Maka dari itu mengurus perberasan nasional tidak bisa grasa-grusu, apalagi menutup mata dan telinga terhadap problem sesungguhnya. Rasionalitas perlu dikedepankan, kearifan pun dijalankan agar kebijakan yang diambil tidak dengan menepuk dada tetapi dengan pikiran.

Awal tahun 2018 ini situasi perberasan memburuk. Beras semakin mahal. Di Pasar Induk Beras Cipinang, harga beras jenis medium awal Januari lalu mencapai harga antara Rp10.500 sampai Rp11.500 lebih tinggi dari harga beras pada awal 2017, yakni Rp 9.500.

Sampai awal Februari ini harga beras masih belum stabil. Logika kenaikan harga salah satunya tentu disebabkan karena pasokan yang rendah. Namun kita bisa melihat Kementerian Pertanian akhir-akhir ini semakin gencar meyakinkan publik bahwa panen padi melimpah, tidak perlu risau dan apalagi berpikir untuk impor. Meskipun pada akhirnya pemerintah tetap mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Lalu dimana letak soal sesungguhnya?.

## Komprehensif Membaca Persolan

50 tahun lebih pengalaman Indonesia mengurus beras nampaknya tidaklah cukup untuk kita belajar banyak hal. Jika kita ingin melihat sejarah kebijakan perberasan Indonesia ada baiknya kita membaca buku yang ditulis Leon A. Mears (1982). Buku tersebut telah amat komprehensif memotret

persoalan perberasan nasional dari sisi produksi, distribusi, konsumsi dan kelembagaan-kelembagaan yang ada. Soal karakteristik konsumen beras misalnya, Mears telah mencoba memprediksi kecenderungan konsumsi jangka panjang dan faktor-faktor penentu permintaan beras di dalam negeri. Tidak hanya itu persoalan distribusi juga dijelaskan Mears dengan baik.

Sekarang ini yang hilang dari pikiran pengambil kebijakan adalah ketidakmampuan kita melihat persoalan secara komprehensif. Kita belum melihat persoalan produksi, distribusi, konsumsi dan kelembagaan pendukung sebagai suatu kesatuan yang harus diurus dan diselesaikan. Kebijakan kita masih sangat bias produksi. Kita tidak memikirkan perubahan perilaku konsumen beras, tantangan distribusi dan membangun secara serius kelembagaan cadangan pangan masyarakat.

Pada aspek konsumen beras misalnya, konsumen sudah punya selera yang beragam terhadap beras. Tidak bisa lagi disamakan atau dipaksa untuk sama. Konsumen yang menginginkan beras Pandan Wangi mereka akan tetap mencari beras itu dan bahkan tidak akan membeli beras lain sampai waktu tertentu. Preferensi konsumen beras yang seperti ini harus menjadi perhatian dalam kebijakan perberasan nasional, sehingga kita bisa memberi kebebasan kepada petani untuk menanam varietas yang diinginkan konsumen di tempat mereka. Termasuk pada

akhirnya kita bisa memahami strategi pedagang melakukan pencampuran beras karena hal ini ditunjukkan sebetulnya untuk membuat harga menjadi terjangkau dan tercipta beras sesuai dengan preferensi konsumen.

Pada aspek distribusi, dalam bukunya Mears (1982) sudah menulis bahwa tersedianya prasarana perhubungan dan komunikasi yang efisien dengan armada angkutan yang dapat diandalkan dan informasi yang tepat pada waktunya, serta dapat dipercaya, merupakan hal yang sangat penting. Tantangan distribusi di Indonesia adalah pada kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau dan menyebar luas. Hal ini sudah pasti menyebabkan biaya distribusi menjadi mahal. Selain tantangan infrastruktur tersebut juga terdapat persoalan pungutan di jalan, baik yang bersifat resmi dan yang tidak resmi. Sejak zaman dahulu sampai sekarang pungutan liar masih tetap terjadi. Pada saat sekarang misalnya, para pedagang beras dari Sumatera Barat yang menjual beras melalui jalur darat ke Provinsi Riau mengeluhkan banyaknya pungutan liar di jalan yang mereka alami. Jadi persoalan pada aspek distribusi membutuhkan perhatian dan penanganan serius.

Hal lain adalah sistem cadangan pangan masyarakat tidak bekerja dengan baik. Secara nasional kita hanya mengandalkan Bulog. Padahal terdapat berbagai kearifan lokal yang perlu di institusionalisasi kem-

bali. Kita perlu lumbung-lumbung pangan rakyat direvitalisasi kembali secara serius.

Persoalan terakhir tentu adalah soal kebingungan kita pada data. Perbedaan data antara lembaga yang satu dengan yang lain membuat kebijakan yang diambil akan penuh dengan keraguan dan tidak tepat sasaran. Debat soal data ini saya kira sudah lama, tetapi nampaknya kita belum memiliki solusi yang memadai. Saya berharap Badan Pangan Nasional segera dibuat, karena badan ini akan mampu membuat kita secara komprehensif membaca dan menyelesaikan persoalan, termasuk persoalan pada data pangan nasional.

Terakhir, saya ingin ingatkan kepada kita semua, pemenuhan pangan setiap warga negara adalah kewajiban negara, karena itu bahkan pangan diatur menjadi hak asasi manusia. Negara sejatinya diperintahkan untuk mengurus pangan rakyat dengan benar, karena bukan hanya soal hidup atau mati satu individu saja tetapi juga soal masa depan negara dan bangsa itu sendiri. Bung Karno ketika peletakkan batu pertama IPB telah menyadari hal ini dengan amat baik. Jauh sebelum itu ketika zaman penjajahan Belanda, telah dibentuk lembaga pangan yang diberi nama Stichting Het Voedingsmidlenfonds (VMS) yakni sebuah institusi yang mengurus distribusi dan logistik beras. Ini adalah bentuk kesadaran bahwa masalah pangan amat penting dan memerlukan pengaturan khusus dari pemerintah. Di era reformasi, kita melahirkan Undang-Undang Pangan yang secara tegas mengamanatkan juga pembentukan badan pangan nasional setingkat kementerian, yang sampai hari ini belum mampu diwujudkan pemerintah. (\*)